

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI SULAWESI SELATAN**

Syamsu Alam

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : alam.s@unm.ac.id

Andi Wahyudin

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : wahyu_s14@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama yang ideal dalam pembangunan. Pemerintah di dalam setiap implementasi kebijakan senantiasa menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, sekaligus berupaya mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Metode dasar yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan eksplanatori. Dengan memanfaatkan persamaan simultan alokasi belanja modal, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui *multiple regression* data panel dengan perangkat analisis Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Belanja Modal (ABM) kabupaten/kota di Sulsel selama periode 2012-2016 berfluktuatif. ABM berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara simultan ABM dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Koefisien regresi untuk masing-masing variabel yaitu, 0,003 untuk alokasi belanja modal; 3,2 untuk kualitas sumber daya manusia; dan -0,03 untuk pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Uji Chow test dan Uji Hausman persamaan regresi simultan menggunakan *fix effect* model untuk model persamaan kedua, dan *random effect* model untuk persamaan regresi ketiga, dengan taraf signifikansi 5 persen.

Kata Kunci : Belanja Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan

**INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITURE TO HUMAN RESOURCES
QUALITY, ECONOMIC GROWTH AND COMMUNITY WELFARE
IN SOUTH SULAWESI**

Syamsu Alam

Faculty of Economics, State University of Makassar

Email : alam.s@unm.ac.id

Andi Wahyudin

Faculty of Economics, State University of Makassar

Email : wahyu_s14@yahoo.co.id

ABSTRACT

Wealth of society is the main and ideal purpose in development. Government have to have main purpose to get wealth when implementation government policy. This is the

aim can be get together in the decentralization era. Within decentralization local government can create the policy and program widely, all at once to try to build wealth together with society and serve nearly to them. The basic method used in this research was descriptive and explanatory approach. This research have used simultaneous equation of capital expenditure, human capital, economic growth, and wealth of society with through panel data multiple regression with Eviews software. The result of research show that capital expenditure (ABM) district and town in South Sulawesi in period 2012-2016 was fluctuative. ABM have positive influenced to human capital, economic growth and wealth. Based on simultaneous equation show that ABM and human capital have influenced positive and significant to wealth. While economic growth have effect negative and non-significant to wealth. Coeficient regression for all variable was 0.003 for capital expenditure; 3.2 from human capital; and -0.03 for economic growth. Based on Chow Test and Hausmant Test to regression equation, this result used fixed model for the second equation and random effect model for third regression, with 5 % significant.

Key Words : Capital Expenditure, Human Capital, Wealth

PENDAHULUAN

Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh mengesankan dibanding negara lain di Asia Tenggara namun isu rendahnya kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan masih mendominasi publikasi media dan penelitian. Pada saat ekonomi dunia mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru meningkat mencapai 6,5 persen. Tahun 2017, Indonesia diprediksi masuk jajaran 15 negara dengan PDB di atas satu trilyun dollar. Di Sulawesi Selatan, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan cukup signifikan melebihi 8 persen, atau di atas angka pertumbuhan ekonomi rata-rata secara nasional. Namun pertumbuhan ini dinilai belum berkualitas, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dan ideal dalam pembangunan. Pemerintah di dalam setiap implementasi kebijakan senantiasa menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, sekaligus berupaya mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Alokasi belanja modal pada setiap daerah yang dijabarkan dalam APBD sebagai investasi sektor publik sangat diperlukan, karena di samping memberikan pengaruh langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi program-program padat karya, juga secara tidak langsung melalui pengembangan aktivitas usaha ekonomi bagi perusahaan (Pressman, 2000). Ketersediaan sejumlah infrastruktur di daerah akan mendorong berkembangnya investasi swasta sehingga membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan.

Belanja pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan barang publik seperti sarana jalan, sarana irigasi, sarana kesehatan berupa rumah sakit, sarana pendidikan dan infrastruktur lainnya. Pengeluaran semacam ini sering disebut sebagai pengeluaran *Sosial Overhead Capital* (SOC). Keuntungan dan pengeluaran SOC ini baru dirasakan manfaatnya apabila timbul permintaan dalam

masyarakat, semakin besar permintaan terhadap SOC ini, maka akan semakin efektif pengeluaran tersebut.

Sejalan dengan itu Shah (2006), secara spesifik merekomendasikan dua poin penting untuk diprioritaskan oleh pemerintah daerah di Indonesia dalam mengalokasikan belanjanya, yakni : Pertama, pengalokasian belanja pemerintah daerah pada kegiatan pembangunan yang mempunyai *cost recovery* tertinggi; Kedua, pengalokasian belanja daerah pada kegiatan pembangunan yang mampu merangsang penerimaan daerah. Rekomendasi ini menunjukkan pentingnya memprioritaskan pengelolaan pengeluaran daerah yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, agar mampu menjamin kesinambungan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka panjang, sehingga diharapkan perekonomian daerah bertumbuh dan mendorong terbukanya peluang ekonomi masyarakat.

APBD Provinsi Sulawesi Selatan terus meningkat, diikuti dengan perubahan struktur pada bagian Pendapatan dan Belanja. Dari sisi pendapatan, selama kurun waktu 2010-2015, porsi dana perimbangan mengalami penurunan, yang menunjukkan tingkat ketergantungan daerah kepada anggaran pusat semakin menurun. Namun demikian, pada pos Lain-Lain PAD yang sah, porsinya mengalami peningkatan dalam kurun dua tahun terakhir, salah satunya didorong oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD tahun sebelumnya yang cukup besar. Dari sisi belanja, terdapat hal menggembirakan pada tahun 2013 yaitu porsi belanja modal adalah terbesar dalam lima tahun terakhir sebesar 19,24 %. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN Tahun 2014-2019, mengharapakan porsi belanja modal mencapai 30 %. Kenaikan porsi belanja modal tersebut mencerminkan perhatian pemerintah propinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Berdasarkan data rata-rata realisasi belanja modal dan IPM tahun 2012-2016, dapat dilihat bahwa belanja modal belum searah dengan peningkatan IPM. Realisasi belanja modal yang tinggi tidak serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga tinggi. IPM sebagai proxi dari Kualitas Sumber Daya Manusia. Meskipun pada umumnya kabupaten/kota belum selaras antara tingginya belanja modal dan tingginya IPM, namun ada kabupaten/kota yang menunjukkan realisasi belanja modal yang tinggi juga disertai dengan IPM yang tinggi.

Berdasarkan perspektif pentingnya studi ini, selanjutnya dipilih topik lebih spesifik yang dirumuskan dalam judul penelitian : Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu : data APBD dalam bentuk Alokasi Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia, serta data penunjang penelitian lainnya.

Definisi Operasional

Studi ini akan menguji pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan. Untuk mengoperasionalkan masing-masing variabel penelitian, maka disusun definisi operasional sebagai berikut :

1. Alokasi Belanja Modal (ABM) adalah pengeluaran pemerintah berupa penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan. Komponen-komponen belanja modal mencakup, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan belanja bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset tetap lainnya. Alokasi Belanja Modal diukur dengan rasio belanja modal terhadap total belanja.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia pendidikan (SDM) diproksi dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dimana Rata-rata Lama Sekolah diukur dengan lama menempuh pendidikan formal (tahun).
3. Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah perubahan relatif nilai riil produk domestik bruto pada daerah otonom kabupaten dan kota dalam suatu periode tertentu. Besarnya pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam bentuk persen.
4. Kesejahteraan masyarakat dinyatakan (IPM)) adalah terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat sehingga mencapai kualitas hidup yang layak. Kesejahteraan masyarakat ini diproksi dari pencapaian IPM yang menggambarkan tingkat perkembangan dan kemampuan sumber daya manusia pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk melihat rasio atau perbandingan Belanja Modal, Rata-rata Lama Sekolah, dan IPM kabupaten/kota di Sulsel.

Analisis Model Struktural

Untuk meneliti keterkaitan antara alokasi belanja modal, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat akan digunakan persamaan simultan model rekursif. Dengan demikian spesifikasi umum model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Model persamaan regresi pengaruh Belanja Modal terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia

$$KSDM = \alpha + \beta_1AMB + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$
2. Model persamaan regresi pengaruh Belanja Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

$$PE = \alpha + \beta_1AMB + \beta_2KSDM + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$
3. Model persamaan regresi pengaruh Belanja Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

$$IPM = \alpha + \beta_1AMB + \beta_2KSDM + \beta_2PE + \varepsilon \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

- KSDM : Kualitas Sumber Daya Manusia
- PE : Pertumbuhan Ekonomi
- IPM : Kesejahteraan Masyarakat
- α : Intercept
- β : Koefisien regresi yang diestimasi
- ε : error term

Uji Persamaan Simultan

Persamaan simultan merupakan himpunan persamaan di mana variabel tak bebas dalam satu atau lebih persamaan juga merupakan variabel bebas di dalam beberapa persamaan lainnya. Dalam sistem persamaan simultan untuk mendeteksi simultanitas antar variabel dilakukan dengan uji Hausman dan Uji Eksogenitas. Kondisi Simultanitas pada suatu sistem persamaan simultan perlu dilakukan untuk menentukan apakah terjadi bias simultanitas atau tidak. Uji bias simultan dilakukan untuk

memastikan apakah model persamaan simultan yang digunakan dapat diperlakukan sebagai persamaan simultan atau tidak.

Peralatan yang paling sering digunakan untuk pengujian bias simultan adalah Hausman Test. Prosedur pengujian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : (1) menyusun bentuk persamaan *reduced form*; (2) melakukan estimasi dengan menggunakan metode OLS; (3) residual hasil estimasi *reduced form* variabel yang dianggap endogen disubstitusi ke dalam persamaan struktural dan diestimasi dengan menggunakan metode OLS; dan (4) jika koefisien residual sama dengan nol maka *null hypothesis* tidak ditolak yang berarti tidak simultan, dan jika koefisien residual tidak sama dengan nol maka *null hypothesis* ditolak yang bias simultan.

- H_0 = variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen
- H_a = variabel endogen tidak dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen

Jika nilai probabilitas F-hitung lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dibenarkan memiliki hubungan simultan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F-hitung lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka model yang digunakan tidak dibenarkan memiliki hubungan simultan.

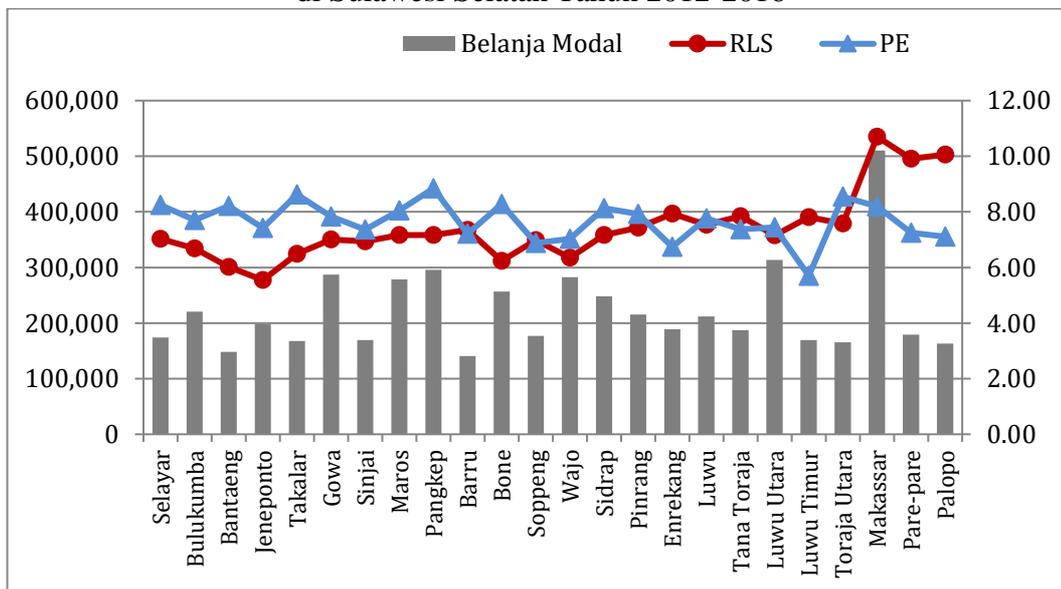
HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Hasil Penelitian

Analisis data deskriptif digunakan untuk menggambarkan rasio atau perbandingan alokasi belanja modal, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kabupaten/kota di Sulsel.

Grafik 1.

Rata-Rata Alokasi Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan RLS Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016



Sumber : Data BPS diolah, output Eviews (2017)

Berdasarkan akumulasi rata-rata realisasi belanja modal dan rata-rata RLS selama tahun 2012-2016, Makassar masih menduduki posisi paling tinggi. Selama tahun 2012-2016 kota-kota di provinsi Sulsel konsisten mencapai rata-rata lama sekolah tertinggi dibandingkan pencapaian kabupaten. Meskipun demikian secara keseluruhan dapat dilihat bahwa belanja modal belum berjalan searah/berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan RLS.

Alokasi belanja modal Kabupaten Barru yang terkecil di Sulsel namun perolehan rata-rata lama sekolah melampaui daerah lain yang belanja modalnya lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja peningkatan kualitas sumber

daya manusia di kabupaten ini. Demikian pula Kabupaten Bantaeng, meskipun belanja modalnya terkecil kedua setelah Kabupaten Barru namun kinerja pertumbuhan ekonomi dan RLSnya melampaui daerah lain yang belanja modalnya lebih besar. Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan sumber daya manusia.

Model Persamaan Regresi Pengaruh Belanja Modal terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil analisis data dan Uji Chow Test dan Hausman, maka persamaan regresi untuk pengaruh ABM terhadap KSDM ditetapkan menggunakan model random efek.

1. Persamaan Regresi untuk pengaruh ABM terhadap KSDM, untuk menjawab hipotesis pertama,
$$\text{KSDM} = 7,15 + 0,001 \text{ ABM}$$
2. Model persamaan regresi pengaruh belanja modal, kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan uji *Chow Test* persamaan regresi kedua menggunakan FEM.
$$\text{PE} = 9,55 + 0,05 \text{ ABM} + 2,20 \text{ KSDM}$$
3. Model persamaan regresi pengaruh belanja modal, kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Hausman Test, probabilitas *Cross-Section Random* lebih besar dari 0,05 ($0,4877 > 0,05$), maka persamaan regresi ketiga menggunakan random Effect Model (REM).
$$\text{IPM} = 42,96 + 0,003 \text{ ABM} + 3,21 \text{ KSDM} - 0,03 \text{ PE}$$
4. Alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan output analisis data menunjukkan bahwa realisasi alokasi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas statistik parsial sebesar 0,0000.
5. Alokasi belanja modal dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial realisasi alokasi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar 0,042. Sedangkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif, namun tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas statistik parsial sebesar 0,08, atau lebih besar dari nilai signifikansi 5 persen.
6. Alokasi belanja modal dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial realisasi alokasi belanja modal dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan, dengan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,000 jauh di bawah nilai signifikansi 90 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, dan tidak signifikan pada kesejahteraan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas statistik parsial sebesar 0,50, atau lebih besar dari nilai signifikansi 5 persen.

PEMBAHASAN

Kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam kebijakan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk semakin nyata memanfaatkan

kewenangannya untuk mengembangkan kapasitas pembangunan dan perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan APBD merupakan gambaran keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek belanja daerah, kebijakan belanja harus bisa memberikan efek multiplier yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat melalui program-program yang didanainya.

Pengaruh Belanja Modal Pada Kualitas Sumber Daya Manusia

Belanja pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan barang publik seperti sarana jalan, sarana irigasi, sarana kesehatan berupa rumah sakit, sarana pendidikan dan infrastruktur lainnya. Pengeluaran semacam ini sering disebut sebagai pengeluaran *Sosial Overhead Capital* (SOC).

Hasil penelitian menunjukkan alokasi belanja modal mampu menjelaskan variabel kualitas sumber daya manusia sebesar 36 persen. Dengan nilai koefisien regresi atau elastisitas yang cukup kecil sebesar 0,001. Secara parsial, nilai *intercept* kabupaten/kota kebanyakan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya belanja modal maka berdampak negatif bagi kualitas sumber daya manusia. Hasil ini senada dengan penelitian Asghar et al. (2011) juga menemukan adanya hubungan positif antara belanja pemerintah pada modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja pelayanan berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumberdaya untuk sosial untuk meningkatkan produktivitas.

Belanja modal yang dialokasikan untuk pengeluaran SOC ini baru dirasakan manfaatnya apabila timbul permintaan dalam masyarakat, semakin besar permintaan terhadap SOC ini maka akan semakin efektif pengeluaran tersebut. Studi empiris empiris menunjukkan bahwa belanja modal yang diperuntukkan untuk SOC dalam jangka panjang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pengaruh Alokasi Belanja Modal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai syarat perlu (*necessary condition*) dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Berdasarkan hasil penelitian alokasi belanja modal dan kualitas sumber daya manusia mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Sulsel dengan kontribusi sebesar 70 persen (*adjust R-squared* 0,70). Dengan koefisien regresi/elastisitas masing-masing, 0,05 untuk alokasi belanja modal dan 2,20 untuk kualitas sumber daya manusia. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi SDM lebih elastis mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asghar et al. (2011) juga menemukan adanya hubungan positif antara belanja pemerintah pada modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja pelayanan berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk sosial untuk meningkatkan produktivitas.

Jika dikaitkan dengan bonus demografi maka sejatinya belanja modal pemerintah daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal senada juga dikemukakan oleh Radvansky (2011), bahwa investasi dalam bentuk pengeluaran pada pendidikan yang mengarah pada pelatihan dan pencegahan kesehatan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang menemukan bahwa belanja modal kabupaten/kota di Sulsel berdampak secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa peningkatan belanja modal satu persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05 persen. Hal berbeda yang dikemukakan oleh Nasiru (2012) yang mengkaji hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria (1961-2010) dengan pendekatan ECM dan *Granger Causality*, hasil menunjukkan belanja modal menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa setiap pengurangan belanja modal akan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

Belanja modal dan kualitas sumber daya manusia merupakan input utama dalam peningkatan pembangunan ekonomi secara umum dan pertumbuhan ekonomi khususnya. Dalam perspektif pertumbuhan endogen, kualitas SDM yang unggul dan kompetitif merupakan faktor produksi yang paling utama. Hasil penelitian memperkuat pandangan tersebut. SDM yang berkualitas disertai produktivitas akan memberikan kontribusi positif pada pembangunan ekonomi.

Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Indikator IPM sebagai proksi kesejahteraan dapat menunjukkan kondisi pembangunan di daerah dengan alasan IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan akhirnya kesejahteraan. IPM juga dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja daerah dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat. Meskipun menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, IPM belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya, namun hingga saat ini IPM merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia.

Kebijakan APBD kabupaten/kota sebagai bentuk aktualisasi fungsi pemerintah daerah berperan dalam mewujudkan pembangunan pro-rakyat dalam bentuk penyediaan *public services* yang dibutuhkan masyarakat. Tiga aspek pokok kebijakan APBD ini, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. ketiganya akan memberikan implikasi yang berbeda pada pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada sisi penerimaan daerah harus menekan distorsi ekonomi daerah dan pada sisi yang lain kebijakan belanja harus bisa memberikan efek multiplier ekonomi yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan perannya menjalankan fungsi alokatif dan distributif, untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Belanja modal sebagai investasi sektor publik dianggap sebagai media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain pada akhirnya akan berdampak secara langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Belanja modal ini memberikan efek langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi program padat karya, secara tidak langsung melalui pengembangan aktivitas usaha ekonomi bagi perusahaan. Ketersediaan sejumlah infrastruktur ekonomi akan mendorong berkembangnya investasi swasta sehingga membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara simultan hasil penelitian menunjukkan kontribusi alokasi belanja modal kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di

kabupaten/kota di Sulsel sebesar 80 persen. Dengan elastisitas masing-masing 0,003 untuk alokasi belanja modal, 3,21 kualitas SDM, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,03. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan, ternyata belum menunjukkan bukti empiris, meskipun demikian jika dilihat secara parsial pengaruh negatif tersebut tidak signifikan mempengaruhi kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) sejalan dengan hasil penelusuran Badrudin (2011) yang melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM menggunakan data kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Periode penelitian dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hal senada dikemukakan oleh Nurudeen and Usman (2010), belanja modal, pengeluaran untuk pendidikan memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk transportasi dan kesehatan memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan Nurudeen and Usman dalam penelitian ini, menunjukkan pengaruh positif alokasi belanja modal kabupaten/kota di Sulsel terhadap IPM.

Secara keseluruhan persamaan ketiga ini menunjukkan variabel paling penting dan utama dalam meningkatkan kesejahteraan adalah kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas belanja modal, pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM sebagai faktor produksi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan keunggulan daerah dan negara.

KESIMPULAN

1. Indikator IPM sebagai proksi kesejahteraan masyarakat dapat menunjukkan kondisi pembangunan di daerah dengan alasan IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia.
2. Secara deskriptif alokasi belanja modal, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi belum konsisten berbanding lurus dengan kesejahteraan di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
3. Secara simultan alokasi belanja modal, kualitas sumber daya manusia yang diproksi dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang diproksi dengan IPM. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap IPM. Secara parsial kualitas sumber daya manusia mempunyai elastisitas yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2009. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. C.V. Budi Daya Makassar.
- Agussalim. 2007. *Peran Anggaran Pemerintah Terhadap Pengurangan Angka Kemiskinan di Indonesia*. Ekonomi dan Bisnis. Vol. 10 No. 1.
- Arsyad Lincoln. 1999. *Teori Ekonomi Pembangunan Daerah*, Intermedia, Jakarta.
- Arsyad Nurjaman, dkk. 1992. *Keuangan Negara*, Intermedia, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 2015. *Sulawesi Selatan Dalam Angka*, Sulawesi Selatan.
- BPS. *Statistik Keuangan Berbagai Terbitan 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016*.
- BPS. 2016. *PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Takalar*.
- BPS. *Sulsel Dalam Angka Berbagai Terbitan, 2013-2017*, Makassar.

- Brodjonegoro, Bambang. 2001. *The Impact of Fiscal Decentralization Process to The Indonesian Regional Economies : A Simultaneous Econometric Approach*, LPEM FE UI, Jakarta.
- Gujarati, D. N., and D. C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*, 5th edition. McGraw-Hill, American.
- Hayek. 1985. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol.1 No. 2, 42-51.
- Hyman, David N. 2008. *Public Finance : A Contemporary Application of Theory to Policy*. 9th Edition. Mason : South-Western Cengage Learning.
- Jhingan, M. L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Edisi Ke-3 UI-Press, Jakarta.
- Lewis. 2001. *Planning and Budgeting In Poor Countries*. New Brunswick, NJ : Transaction.
- Musgrave, P dan Musgrave, R. 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Erlangga, Jakarta.
- Mustopadidjaya. 1997. *Ekonomi Perencanaan Pembangunan*. Intermedia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (penyempurnaan Permendagri No. 13 Tahun 2006).
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Permendagri Nomor 27 tahun 2013. *tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014*.
- Pressman, Steven. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Terjemahan Edisi Pertama. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.
- Samuelson. 1996. *Financial Management*, McGraw-Hill, New York.
- Shah, A. 2006. *Fiscal Decentralization and Macroeconomic Management*, International Tax Public Finance, Vol. 13.
- Todaro. 1987. *Anggaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*. Genesa. Bandung.
- Todaro, M. P. 2007. *Economic Development*, 11th Edition, Addison-Wesley Logman, London.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004. *tentang Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. *tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Penyempurnaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999).
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* (Penyempurnaan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999).
- UNDP. 2000. *Overcoming Human Poverty. United Nations Development Programme. Poverty Report 2000*.
- World Bank. 2001. *Empowerment and Poverty Reduction-A Sourcebook*. Washington DC : World Bank.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Edisi Revisi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.